

Why Indonesia?



Peringkat EODB meningkat
5 tahun terakhir

\$1 trilyun
GDP

GDP lebih dari **\$1 trilyun**
(PPP)



Populasi **270 juta**,
42% umur dibawah 25 tahun



Sovereign credit rating
menunjukkan kenaikan



Satu-satunya anggota G20
dari ASEAN



Ekonomi terbesar di ASEAN



70 juta “Consuming class”



Biodeversity terbesar **ke-2** di
Asia, mendukung pariwisata



Pengguna internet terbesar
ke-5 di dunia

Investment Target



“.. bukan hanya kejar target tapi juga tepat sasaran.

Meningkatkan pendapatan masyarakat.

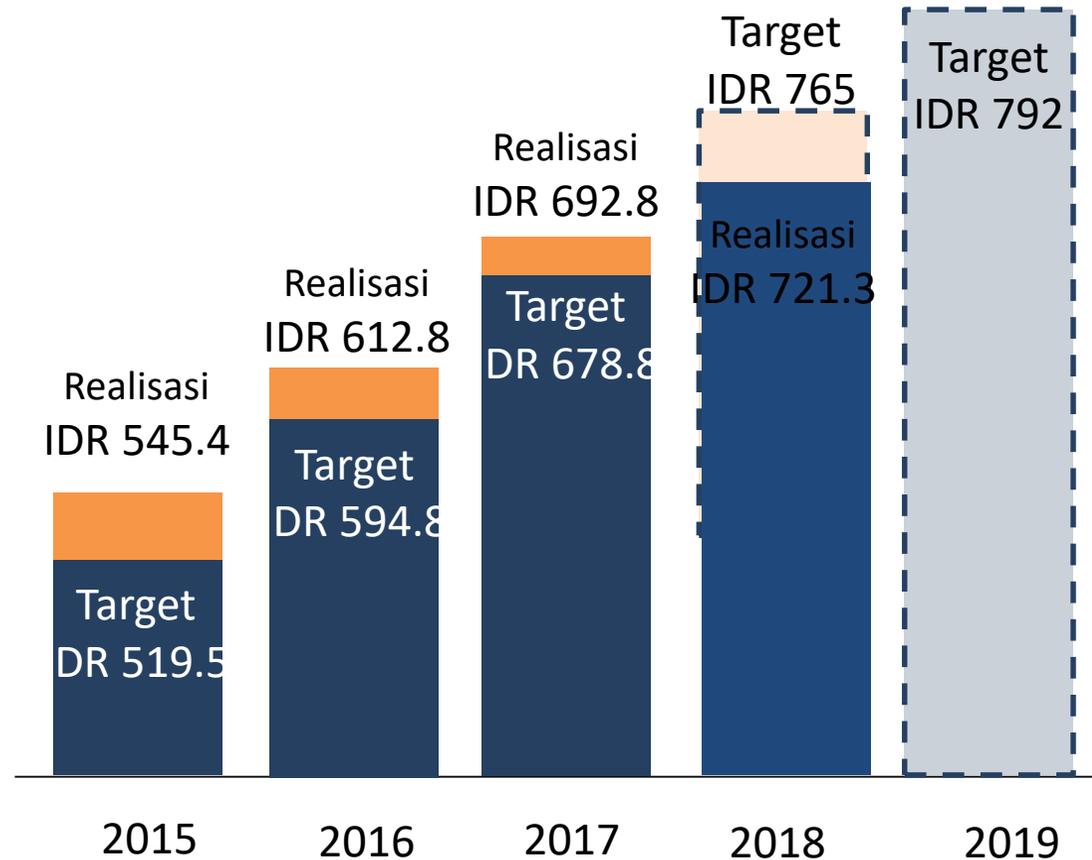
Masuk ke sektor-sektor yang **hasilkan ekspor dan devisa**”

Kepala BKPM, April 2019

Realisasi Investasi

Target 2015 – 2019 (in IDR trillion)

Excl. oil & gas and financial sector



5 Common Challenges



1

Regulasi

Kendala:

- Tumpang tindih dan ketidakpastian kebijakan
- Prosedur perijinan yang rumit
- Kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah

Usaha Pemerintah:

- Dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang diluncurkan pada September 2017, pemerintah menerbitkan **Perpres No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha**.
- Peluncuran sistem **OSS (Online Single Submission)** yang mengintegrasikan perizinan secara elektronik seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah di Indonesia. **Berdasarkan PP No. 24 tahun 2018**.
- Pembentukan tin Satgas Percepatan Berusaha untuk mendorong pertumbuhan investasi



2

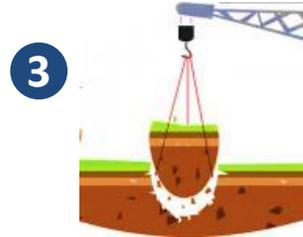
Pajak & Insentif

Kendala:

- Pungutan pajak dan prosedur pengajuan insentif pajak yang rumit
- Insentif fiskal kurang menarik bagi investor

Usaha Pemerintah:

- Kementerian Keuangan meresmikan tanggal 21 Februari 2018 **integrasi data perpajakan** sebagai bentuk transparansi perpajakan
- Pemerintah menerbitkan **Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2016 tentang kebijakan Tax Allowance**, dimana semakin banyak cakupan bidang usaha yang bisa mendapatkan TA.
- Kementerian Keuangan telah menerbitkan **PMK No. 150 tahun 2018 tentang kebijakan Tax Holiday dan mini Tax Holiday**.



3

Ketersediaan Lahan

Kendala:

- Ketersediaan lahan dan prosesnya yang memakan waktu lama sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- Spekulasi kenaikan harga tanah

Usaha Pemerintah:

- Penerbitan **PP No. 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional**. Menteri Agrari dapat menerbitkan rekomendasi pemanfaatan ruang jika Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah.



4

SDM & Perijinan TKA

Kendala:

- Rendahnya kualitas SDM
- Prosedur untuk mendapatkan perizinan tenaga kerja asing cukup rumit

Usaha Pemerintah:

- Pemerintah telah menerbitkan **PP No. 45 tahun 2019** tentang insentif untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan vokasi dan R&D.
- Penerbitan **Perpres No. 20 tahun 2018** untuk mempermudah perizinan TKA.



5

Infrastruktur

Kendala:

- *Dwelling time* yang lama di pelabuhan
- Kurang tersedianya infrastruktur yang memadai

Usaha Pemerintah:

- Kebijakan pemeriksaan barang di luar kawasan kepabeanan atau **post border** efektif mulai 1 Februari 2018 melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) untuk mempercepat arus pengeluaran barang dari pelabuhan.
- Pemerintah Indonesia menawarkan beberapa alternative pembiayaan infrastruktur seperti PINA (Pembiayaan Infrastruktur Non APBN).
- Penetapan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas untuk mempercepat penyediaan infrastruktur.

Improving Investment Climate

Relaksasi daftar negatif investasi



Review DNI terus dilakukan dalam rangka relaksasi DNI untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan memberikan iklim bisnis yang kondusif bagi investor

Pemberian insentif perpajakan

Vocational Education



- ✓ Penerbitan PMK No. 150 tahun 2018 dan Peraturan BKPM No. 1 tahun 2019 tentang kebijakan Tax Holiday dan mini Tax Holiday.
- ✓ Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2016 tentang kebijakan Tax Allowance, dimana semakin banyak cakupan bidang usaha yang bisa mendapatkan TA.
- ✓ Penerbitan Pemerintah telah menerbitkan PP No. 45 tahun 2019 tentang insentif untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan vokasi dan R&D.

Integrasi online pelayanan perizinan

- ✓ sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah
- ✓ NIB, Izin Usaha dan Lisensi Komersial dikeluarkan pada hari yang sama dengan komitmen dan kepatuhan



“Kopi Mantap”

(Koordinasi Pengawasan Investasi Memanfaatkan Aplikasi)

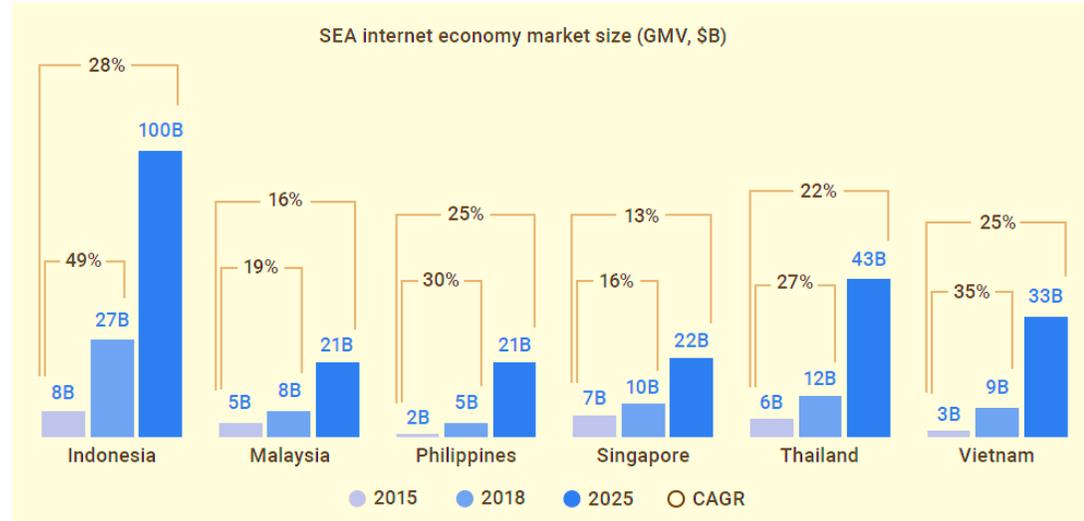
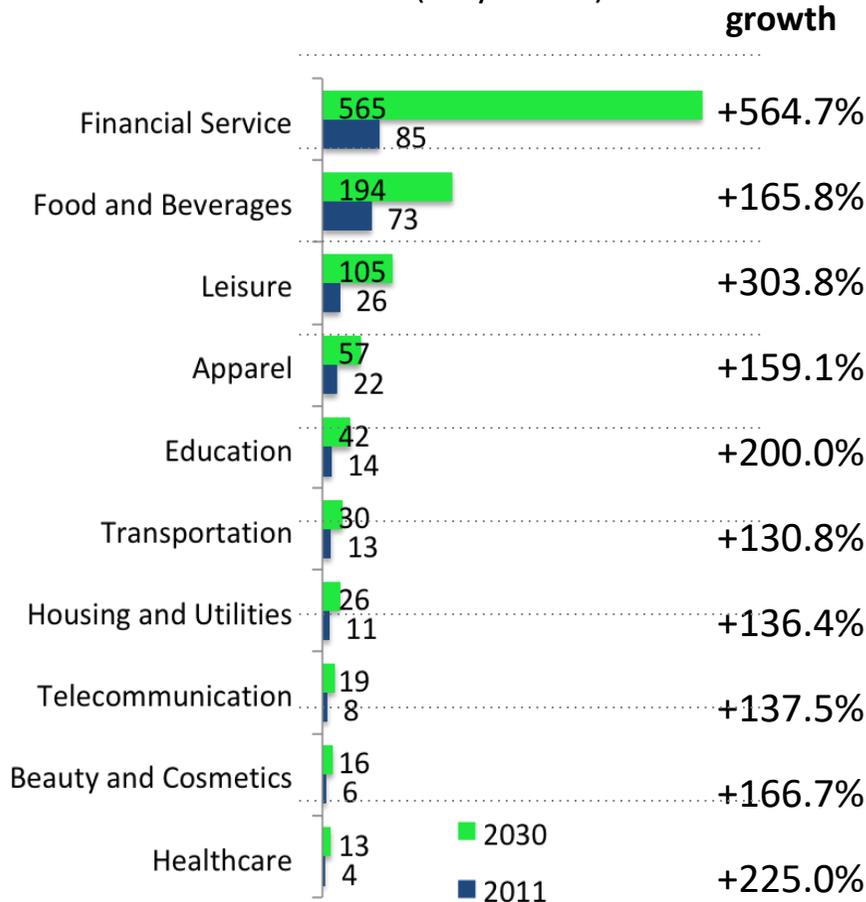


- ✓ Memudahkan koordinasi fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan melalui OSS oleh Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten dan Kota
- ✓ Memberikan efektivitas dan efisiensi koordinasi dengan platform online yang didukung fitur kolaborasi, knowledge sharing, serta pertemuan jarak jauh melalui video atau audio conference

Promising Sector: Lifestyle Industry & Digital Economy

Pengeluaran Masyarakat Indonesia kelas Menengah

(Milyar USD)



Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital paling cepat dan ukuran pasar paling besar di Asia Tenggara

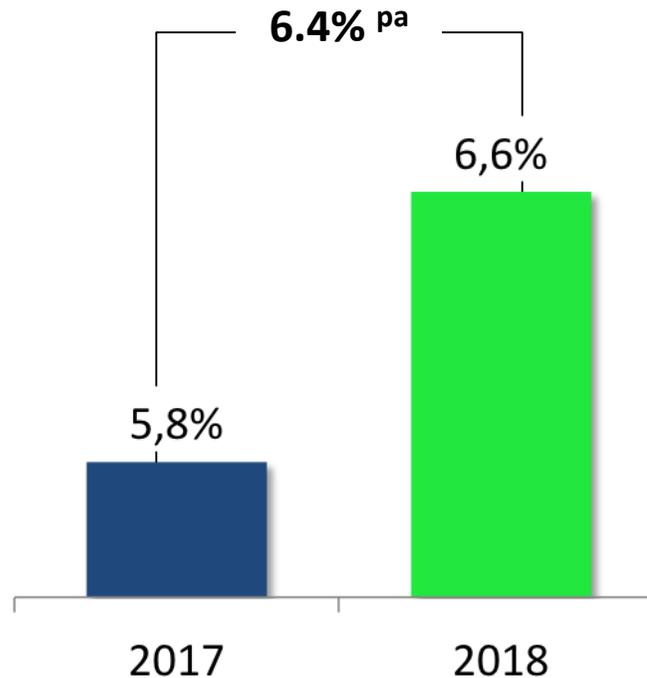
Source: Canback Global Income Distribution database; Indonesia Central Bureau of Statistics, Mckinsey Consumer and Shopper Insight Indonesia Study, 2011, Mckinsey Global Growth Model; Mckinsey Global Institute analysis

Promising Sector: Tourism

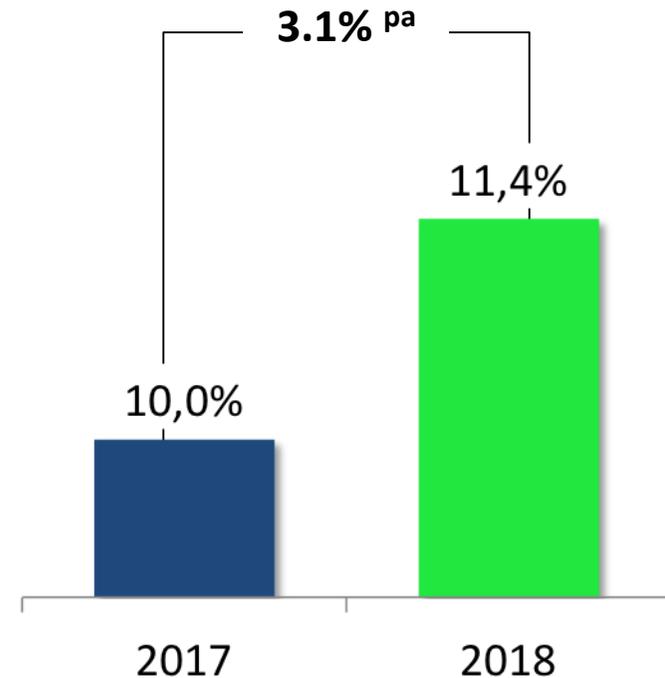
- Pertumbuhan Travel & tourism industri **50% lebih cepat** dari pertumbuhan **GDP global**
- International tourist arrival **tumbuh 7%** tahun 2017

... dalam 15-20 tahun ke depan **1 dari 4 lapangan kerja baru** datang dari pariwisata. Oleh karena pentingnya Pariwisata di era digital...

Presiden Joko Widodo, 2018



Contribution Travel & Tourism to Indonesia GDP



Contribution Travel & Tourism to Employment

Indonesia **Investment Promotion Centre (IIPC)**



Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Indonesia Investment Coordinating Board

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia

t +62 21 525 2008 | **f** +62 21 525 4945 | **e** info@bkpm.go.id

bkpm.go.id | investindonesia.go.id